

**BASELANG**

Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

Analisis Jaringan Multi-Aktor dalam Implementasi Program Agropolitan di Selupu Rejang, Indonesia

Multi-Actor Network Governance in the Implementation of the Agropolitan Program: A Social Network Analysis of Penta Helix Collaboration in Selupu Rejang, Indonesia

Mya Novita Sari, Yonariza, Hasnah, Sri Wahyuni

Program Studi Ilmu Pertanian, Universitas Andalas, Padang-Indonesia

Keywords : Agropolitan, Social Network Analysis (SNA), Sinergitas Multipihak, Integrasi Rantai Nilai Agribisnis, Kabupaten Rejang Lebong.

Email:

myanovitasari75@gmail.com,
yonariza@agr.unand.ac.id,
hasnah@agr.unand.ac.id,
sriwahyuni@agr.unand.ac.id

Program Studi Ilmu Pertanian,
Universitas Andalas, Jl. Dr.
Mohammad Hatta Limau Manis,
Padang, Sumatera Barat Indonesia.

ABSTRAK

Pembangunan kawasan agropolitan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memperkuat perekonomian perdesaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan sinergitas multipihak dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur jejaring aktor dalam implementasi Program Agropolitan di Kawasan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, serta implikasinya terhadap integrasi rantai nilai agribisnis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif melalui Social Network Analysis (SNA), berbasis data wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (FGD), serta telaah dokumen resmi pemerintah daerah dan publikasi Badan Pusat Statistik. Sebanyak 17 aktor utama dipetakan ke dalam matriks adjacency dengan skala intensitas hubungan 0–3 dan dianalisis menggunakan indikator sentralitas derajat, sentralitas antara, dan sentralitas kedekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jejaring Program Agropolitan Selupu Rejang masih bersifat hierarkis dan terfragmentasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi lintas sektor dan terbatasnya sinergi multipihak, sehingga perbaikan tata kelola jejaring menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan kawasan agropolitan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kawasan Agropolitan, Social Network Analysis (SNA), Sinergitas Multipihak, Integrasi Rantai Nilai Agribisnis, Kabupaten Rejang Lebong.

ABSTRACT

The development of agropolitan areas is increasingly recognized as a strategic instrument for enhancing agricultural value addition and strengthening rural economic

systems. However, the effectiveness of this approach is fundamentally contingent upon the quality of governance and the degree of synergy achieved among diverse stakeholders involved in its implementation. This study examines the structure of actor networks within the implementation of the Agropolitan Program in the Selupu Rejang Area, Rejang Lebong Regency, and assesses its implications for the integration of the agribusiness value chain.

A qualitative research design was employed, complemented by quantitative network metrics through Social Network Analysis (SNA). Data were collected through in-depth interviews, field observations, focus group discussions, and a review of official government documents as well as statistical publications from the Central Bureau of Statistics. Seventeen key actors were identified and operationalized into an adjacency matrix using a 0–3 interaction intensity scale. The network was analyzed using degree centrality, betweenness centrality, and closeness centrality to assess actor influence, brokerage roles, and relational proximity.

The findings indicate that the actor network governing the Selupu Rejang Agropolitan Program remains predominantly hierarchical and fragmented. Such a structure reflects weak cross-sectoral integration and limited multi-stakeholder collaboration, both of which hinder the effective coordination needed for a robust agribusiness value chain. Consequently, strengthening network governance emerges as an essential prerequisite for achieving sustainable and synergistic agropolitan area development.

Keywords: Agropolitan, Social Network Analysis (SNA), Multi-stakeholder Synergy, Agribusiness Value Chain Integration, Rejang Lebong Regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian terintegrasi—termasuk pendekatan agropolitan—kembali menjadi agenda strategis di berbagai negara berkembang. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan nilai tambah pertanian, serta memperkuat keterhubungan antara produksi, pengolahan, dan pemasaran (World Bank, 2020; FAO, 2021; OECD, 2021). Keberhasilan pengembangan kawasan pertanian saat ini semakin ditentukan oleh kapasitas tata kelola yang mampu menyatukan beragam aktor dalam suatu sistem agribisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan (UNDP, 2022; OECD, 2023).

Di Indonesia, pengembangan kawasan berbasis potensi lokal telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024. Fokus kebijakan meliputi penguatan kawasan pertanian unggulan, peningkatan nilai tambah, serta pengembangan kolaborasi multipihak (Bappenas, 2020). Namun, sejumlah evaluasi menunjukkan bahwa implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, keterlibatan aktor non-pemerintah yang belum optimal, serta kelembagaan lokal yang lemah (Asian Development Bank, 2021; OECD, 2022). Kondisi ini membuat banyak program kawasan berjalan terpisah-pisah dan kurang efektif.

Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu merupakan contoh wilayah dengan basis pertanian yang kuat. PDRB daerah ini meningkat dari Rp9.742,12 miliar pada 2020 menjadi Rp12.214,65 miliar pada 2024, sementara PDRB per kapita naik dari Rp33,45 juta menjadi Rp41,25 juta (BPS Kab. Rejang Lebong, 2021–2024). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang utama, yakni 34–36% dari total PDRB, yang menegaskan peran strategis kawasan perdesaan serta relevansi pendekatan agropolitan (BPS Kab. Rejang Lebong, 2024).

Namun, ketergantungan besar pada sektor pertanian belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024, 67,57% penduduk berada pada usia produktif dan 55,74% tenaga kerja masih terserap di sektor pertanian, sementara tingkat kemiskinan mencapai 14,79% dan pengangguran 2,43% (BPS Kab. Rejang Lebong, 2024). Kesenjangan ini terutama dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai nilai agribisnis serta terbatasnya mekanisme tata kelola kolaboratif antaraktor (FAO, 2021; World Bank, 2023).

Program Agropolitan di Selupu Rejang dirancang untuk memperkuat integrasi hulu–hilir agribisnis dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, kelembagaan desa, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta aktor pendukung lainnya sesuai prinsip penta helix. Meski demikian, keberagaman aktor tidak serta-merta menghasilkan kolaborasi yang efektif apabila tidak didukung struktur jejaring dan mekanisme koordinasi yang jelas (Carayannis et al., 2021; Ansell & Gash, 2022). Berbagai studi kebijakan menunjukkan bahwa banyak program kawasan gagal mencapai tujuan karena dominasi birokrasi, lemahnya hubungan antaraktor, serta terbatasnya peran aktor ekonomi dan pendukung eksternal (OECD, 2021; UNDP, 2022). Akibatnya, integrasi rantai nilai agribisnis tetap dangkal dan manfaat pembangunan kurang dirasakan oleh petani.

Sejalan dengan perkembangan literatur, implementasi program kawasan kini dipandang lebih tepat sebagai proses jejaring yang melibatkan berbagai organisasi dan

kepentingan, bukan sekadar pelaksanaan aktivitas sektoral (Ansell & Gash, 2022; Provan & Kenis, 2023). Social Network Analysis (SNA) direkomendasikan sebagai pendekatan analitis untuk memetakan hubungan antaraktor, mengidentifikasi aktor kunci dan periferal, serta mendeteksi celah struktural dalam jejaring kebijakan (Borgatti et al., 2022). Namun, penerapannya dalam konteks pertanian dan agropolitan di Indonesia masih sangat terbatas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola jejaring multipihak dalam Program Agropolitan di Selupu Rejang menggunakan pendekatan SNA. Analisis difokuskan pada pemetaan struktur aktor, identifikasi aktor sentral dan periferal dalam kerangka penta helix, serta penjelasan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola dan integrasi rantai nilai agribisnis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis, metodologis, dan praktis bagi pengembangan kebijakan kawasan pertanian yang lebih kolaboratif dan berbasis bukti empiris.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA) untuk menganalisis struktur jejaring aktor. Kombinasi pendekatan ini dipilih untuk menangkap kompleksitas implementasi Program Agropolitan sebagai proses tata kelola kawasan yang melibatkan interaksi multipihak lintas sektor dan kelembagaan. Melalui desain ini, penelitian dapat menghasilkan generalisasi analitis mengenai bagaimana struktur jejaring memengaruhi efektivitas program (Bodin, 2009).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Agropolitan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kawasan ini dipilih secara purposif karena telah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, berfungsi sebagai sentra hortikultura regional, serta menjadi sasaran utama intervensi

pembangunan pertanian selama 2019–2024 (RTRW Rejang Lebong). Karakteristik tersebut menyediakan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji dinamika kolaborasi multipihak.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak (aktor) yang terlibat dalam implementasi program yang dijadikan sebagai informan kunci. Aktor didefinisikan sebagai individu yang mewakili organisasi dengan peran, kewenangan, atau kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Agropolitan. Informan kunci dipilih secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan aktual dalam program, yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: (1) pemerintah (OPD pertanian, perencanaan, infrastruktur, ekonomi), (2) dunia usaha (agribisnis, pengolah, pedagang), (3) akademisi (perguruan tinggi, lembaga riset), (4) komunitas (kelompok tani, organisasi masyarakat), dan (5) media/pendukung (LSM, media lokal).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan aktor kunci untuk memahami peran, interaksi, aliran informasi, dan koordinasi;
2. FGD untuk memverifikasi relasi antaraktor dan dinamika kolaborasi;
3. Studi dokumentasi kebijakan dan laporan resmi (RPJMD, rencana strategis OPD, evaluasi program, data statistik);
4. Kuesioner untuk memperoleh data relasional terkait komunikasi, kerja sama, dan pertukaran sumber daya.

Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang menangkap dimensi struktural dan substantif jejaring implementasi kebijakan.

Analisis Data

Analisis dilakukan dua tahap:

1. Analisis tematik kualitatif terhadap wawancara, FGD, dan dokumen untuk mengidentifikasi peran aktor, mekanisme koordinasi, hambatan, dan peluang sinergitas multipihak;

2. SNA untuk memetakan dan menganalisis struktur jejaring dengan indikator degree centrality, betweenness centrality, network density, serta subgroup dan structural holes. Hasil SNA diinterpretasikan kontekstual dengan temuan kualitatif untuk memahami implikasi struktur jejaring terhadap efektivitas tata kelola kawasan.

Validitas Data

Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking terbatas kepada informan kunci, dan transparansi prosedur pengumpulan serta analisis data untuk meningkatkan auditability dan trustworthiness.

Etika Penelitian

Penelitian dilakukan sesuai prinsip etika sosial. Informan diberikan penjelasan tujuan penelitian dan menyetujui partisipasi secara sadar (informed consent). Identitas disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Agropolitan di Kawasan Selupu Rejang melalui pendekatan jejaring aktor dengan dukungan data empiris dan statistik resmi. Hasil disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi struktural ekonomi wilayah, karakteristik sosial ekonomi pendukung, serta pola relasi antaraktor dalam implementasi program.

Secara makro, perekonomian Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren pertumbuhan positif pasca pandemi. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp9.742,12 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp12.214,65 miliar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari Rp6.845,77 miliar menjadi Rp7.892,45 miliar pada periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi sempat berkontraksi pada tahun 2020 sebesar –1,23 persen, namun kembali tumbuh positif sejak 2021 dengan laju relatif stabil hingga 2024. Peningkatan PDRB per kapita dari Rp33,45

juta pada tahun 2020 menjadi Rp41,25 juta pada tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Rejang Lebong (2020–2024) (*Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010*)

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Miliar Rp)	PDRB Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Per Kapita (Rp)
2020	9.742,12	6.845,77	-1,23	33,45 juta
2021	10.215,89	7.012,64	2,44	34,98 juta
2022	10.876,54	7.324,12	4,44	37,12 juta
2023	11.542,77	7.589,33	3,62	39,01 juta
2024	12.214,65	7.892,45	3,99	41,25 juta

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong (2020–2024)

Ditinjau dari struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor utama PDRB Kabupaten Rejang Lebong sepanjang periode pengamatan. Kontribusi sektor ini tercatat sebesar 36,12 persen pada tahun 2020 dan menurun secara gradual menjadi 34,55 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan proporsi, sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi daerah dibandingkan sektor lainnya, seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi.

Tabel 2. Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku (2020–2024)

Sektor	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	36,12	35,87	35,45	34,98	34,55
Industri Pengolahan	9,21	9,34	9,41	9,55	9,62
Perdagangan Besar & Eceran	14,87	15,02	15,21	15,34	15,45
Konstruksi	11,45	11,32	11,28	11,15	11,09
Transportasi & Pergudangan	5,12	5,24	5,31	5,44	5,51
Informasi & Komunikasi	4,87	5,01	5,12	5,23	5,34
Jasa Pendidikan	6,34	6,41	6,45	6,52	6,58
Jasa Kesehatan & Sosial	3,12	3,21	3,25	3,31	3,37
Lainnya	8,90	8,58	8,52	8,48	8,49

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong (2020–2024)

Kondisi struktural tersebut diperkuat oleh karakteristik sosial ekonomi daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebanyak 287.250 jiwa, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 67,57 persen. Lebih dari separuh tenaga kerja, yaitu sekitar 55,74 persen pada tahun 2023, masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 14,79 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, yaitu 2,43 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertanian, khususnya di wilayah agropolitan Selupu Rejang.

Tabel 3. Indikator Sosial-Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong

Indikator	Nilai	Tahun	Sumber
Jumlah Penduduk	287.250 jiwa	2024	BPS
Penduduk Usia Produktif	194.110 jiwa (67,57%)	2024	BPS
Tenaga Kerja Sektor Pertanian	55,74%	2023	BPS/Bappeda
Tingkat Kemiskinan	14,79%	2023	BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,43%	2024	BPS/Disnakertrans

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan pemetaan jejaring aktor menggunakan Social Network Analysis, terdapat 17 aktor utama yang terlibat dalam implementasi Program Agropolitan Selupu Rejang.

Tabel 4. Daftar Aktor Multipihak dalam Program Agropolitan Selupu Rejang

No	Kode Aktor	Nama aktor	Kategori
1	A1	Bappeda	Pemerintah daerah
2	A2	Dinas Pertanian	OPD teknis
3	A3	Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR	OPD teknis
4	A4	Dinas Perdagangan, Koperasi & UMKM	OPD teknis
5	A5	Dinas Ketahanan Pangan	OPD teknis
6	A6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD)	OPD teknis
7	A7	Kecamatan	Pemerintah daerah
8	A8	Kepala Desa	Kelembagaan desa
9	A9	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Kelembagaan desa
10	A10	Koperasi	Kelembagaan desa
11	A11	Kelompok Tani (Petani)	Ekonomi lokal
12	A12	Swasta/Pedagang pengumpul	Ekonomi lokal
13	A13	Penyuluh	Ekonomi lokal
14	A14	Perbankan	Pendukung eksternal
15	A15	Akademisi (UNIB, UPP)	Pendukung eksternal
16	A16	Media	Pendukung eksternal
17	A17	LSM/LSM	Pendukung eksternal

Hasil analisis menunjukkan bahwa Struktur jejaring yang terbentuk dalam implementasi Program Agropolitan Selupu Rejang masih didominasi oleh hubungan vertikal antarorganisasi pemerintah, dengan keterhubungan horizontal antaraktor non-

pemerintah yang relatif lemah. Pola ini menggambarkan bahwa sinergitas multipihak belum terbangun secara optimal dan menjadi konteks empiris utama bagi perumusan masalah analitis.

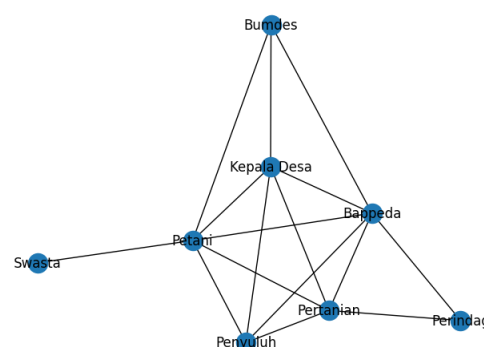
Tabel 5. Indikator Sentralitas Aktor dalam Jaringan Program Agropolitan Selupu Rejang

Aktor	Sentralitas Derajat	Sentralitas Antara	Sentralitas Kedekatan
Bappeda	0.857	0.452	0.875
Dinas Pertanian	0.714	0.024	0.778
Petani	0.857	0.310	0.875
Penyuluh	0.571	0.000	0.700
Kepala Desa	0.714	0.000	0.778
Bumdes	0.429	0.000	0.636
Perindag	0.286	0.000	0.538
Swasta	0.143	0.000	0.500

Hasil analisis sentralitas menunjukkan bahwa Bappeda dan Dinas Pertanian menempati posisi aktor kunci dengan nilai sentralitas derajat, antara, dan kedekatan tertinggi dalam jejaring Program Agropolitan Selupu Rejang. Posisi ini menegaskan peran keduanya sebagai *network core* yang mengendalikan arus informasi, perencanaan, dan implementasi program lintas sektor. Dalam perspektif *network governance*, sentralitas tinggi aktor perencana dan teknis mencerminkan kapasitas koordinatif yang kuat, namun sekaligus menunjukkan ketergantungan jejaring pada sedikit simpul utama (*over-centralization*), yang berpotensi membatasi fleksibilitas dan inovasi kebijakan (Provan & Kenis, 2008; OECD, 2022). Petani, meskipun memiliki sentralitas derajat dan kedekatan yang relatif tinggi, tetap berada pada posisi operasional, bukan sebagai penghubung strategis antar kluster aktor.

Sebaliknya, aktor pendukung eksternal seperti perbankan, akademisi, media, dan LSM secara konsisten menempati posisi periferal dengan nilai sentralitas rendah pada seluruh indikator. Posisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka belum terlembagakan

dalam mekanisme inti implementasi program, melainkan bersifat ad hoc dan insidental. Literatur menegaskan bahwa jejaring pembangunan kawasan dengan aktor eksternal periferal cenderung gagal mengintegrasikan pembiayaan, inovasi, dan pembelajaran kolektif ke dalam sistem agribisnis lokal (FAO, 2021; Carayannis et al., 2021). Dalam konteks ini, ketimpangan posisi aktor memperkuat temuan bahwa sinergitas multipihak dalam Program Agropolitan Selupu Rejang masih bersifat asimetris dan belum berfungsi sebagai jejaring kolaboratif yang produktif.



Gambar 1. Struktur Jaringan Multipihak Program Agropolitan Selupu Rejang.

Visual jaringan yang telah ditampilkan memperlihatkan konfigurasi hubungan antaraktor berdasarkan matriks adjacency (skala 0–3) berikut.

Tabel 6. Matriks Ketetangaan Hubungan Antaraktor Utama (Skala 0–3)

Akto r ↓ / →	Ba pp ed a	Pe rta nia n	Pe ny ulu h	P et a ni	K. De sa	Bu m des	Pe rin da g	Swa sta a
Bappeda	–	3	1	1	2	1	3	0
Pertanian	3	–	3	3	2	0	3	0
Penyuluh	1	3	–	3	2	0	0	0
Petani	1	3	3	–	3	1	0	3
K.Des	2	2	2	3	–	3	0	0
Bumdes	1	0	0	1	3	–	0	0
Perindag	3	3	0	0	0	0	–	0
Swasta	0	0	0	3	0	0	0	–

Tata letak menggunakan *spring layout* sehingga aktor dengan keterhubungan tinggi secara otomatis berada di pusat jaringan. Terlihat jelas bahwa Bappeda dan petani menempati posisi sentral dengan jumlah koneksi paling banyak dan jarak relasi paling dekat dengan aktor lain. Dinas Pertanian dan kepala desa berada pada lapis menengah sebagai penghubung teknis dan koordinatif, sementara Bumdes, Perindag, dan swasta berada di pinggiran jaringan dengan keterhubungan terbatas. Struktur ini mengonfirmasi bahwa jejaring Program Agropolitan Selupu Rejang masih didominasi hubungan intra-pemerintah dan produksi primer, sementara integrasi dengan aktor pasar dan kelembagaan ekonomi desa belum terbangun secara optimal.

Struktur jejaring aktor dalam implementasi Program Agropolitan Selupu Rejang menunjukkan pola yang hierarkis dan terfragmentasi, dengan dominasi aktor pemerintah daerah sebagai simpul utama koordinasi. Pola ini mengindikasikan bahwa tata kelola program masih bertumpu pada mekanisme administratif vertikal, bukan kolaborasi jaringan yang setara. Literatur mutakhir menegaskan bahwa pendekatan

pembangunan kawasan yang didominasi negara cenderung menghasilkan koordinasi parsial dan sulit mendorong integrasi fungsional lintas sektor, khususnya pada konteks negara berkembang (OECD, 2021; World Bank, 2023). Dalam kerangka collaborative governance, sentralitas aktor publik tanpa penguatan relasi horizontal berpotensi menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi (Ansell & Gash, 2022).

Keterfragmentasian jejaring semakin diperkuat oleh posisi perifer aktor pendukung eksternal seperti perbankan, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil. Padahal, literatur global menempatkan aktor-aktor tersebut sebagai elemen kunci dalam mendukung pembiayaan, inovasi, dan aliran pengetahuan dalam pembangunan kawasan berbasis pertanian (FAO, 2021; UNDP, 2022). Dari perspektif Social Network Analysis, struktur jejaring yang minim jembatan antar klaster menciptakan *structural holes* yang menghambat integrasi rantai nilai agribisnis dan membatasi efektivitas program (Borgatti et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama Program Agropolitan Selupu Rejang terletak pada kelemahan tata kelola jejaring, bukan pada ketiadaan aktor atau intervensi kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Agropolitan Selupu Rejang (2019–2024) belum mencapai sinergitas multipihak yang efektif meskipun aktor relatif lengkap.

Analisis SNA menunjukkan dominasi aktor perencanaan dan teknis, terutama Bappeda dan Dinas Pertanian, dalam struktur jejaring implementasi.

Aktor pendukung eksternal (perbankan, akademisi, media, dan LSM) berada pada posisi perifer dengan keterhubungan yang lemah.

Integrasi subsistem hilir dan pasar berlangsung secara informal dan belum terlembagakan.

Keberhasilan program lebih ditentukan oleh kualitas relasi dan orkestrasi jejaring dibandingkan kelengkapan intervensi sektoral.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pendekatan pembangunan kawasan ke depan perlu bergeser dari logika sektoral menuju orkestrasi jejaring multipihak yang lebih integratif, sehingga pengelolaan program tidak lagi terfragmentasi tetapi beroperasi melalui kerja kolaboratif lintas organisasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai network orchestrator yang secara aktif memperkuat konektivitas antar-klastr aktor dan memastikan aliran informasi, koordinasi, serta kolaborasi berjalan efektif. Pada saat yang sama, kelembagaan desa harus diperkuat sebagai simpul lokal yang menghubungkan petani dengan pasar, lembaga pembiayaan, dan aktor pendukung lainnya, sehingga rantai nilai agribisnis dapat terintegrasi dari tingkat tapak. Keterlibatan aktor eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga riset, LSM, dan pelaku usaha regional juga perlu dilembagakan secara struktural melalui mekanisme kemitraan formal, bukan sekadar simbolis atau ad hoc. Untuk memastikan efektivitas tata kelola kawasan, evaluasi program harus memasukkan indikator jejaring yang menilai intensitas kolaborasi, kualitas relasi antaraktor, serta peran aktor penghubung dalam menjaga kohesi dan aliran sumber daya dalam jejaring pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2022). Collaborative governance revisited. *Public Administration Review*, 82(3), 543–556. <https://doi.org/10.1111/puar.13443>
- Asian Development Bank. (2021). *Rural development and inclusive agribusiness in Asia*. Asian Development Bank.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2021). *Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2021*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2022). *Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2022*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2023). *Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2024). *Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2024*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2021). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2021*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2022). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2022*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2023). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2024). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2024*. BPS.
- Bappenas Republik Indonesia. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bodin, Ö., & Crona, B. (2009). The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference? *Global Environmental Change*, 19(3), 366–374.
- Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2022). *Analyzing social networks* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Carayannis, E. G., Grigoroudis, E., Campbell, D. F. J., Meissner, D., & Stamati, D. (2021). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of the Knowledge Economy*, 12(2), 1–30. <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00666-x>
- Carayannis, E. G., Grigoroudis, E., Campbell, D. F. J., Meissner, D., & Stamati, D. (2021). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a

- challenge and driver for innovation. *Journal of the Knowledge Economy*, 12(2), 1–30. <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00666-x>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Territorial approaches to agri-food systems*. FAO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *Strengthening agrifood value chains for rural transformation*. FAO.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Rural development policy review: Indonesia*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Enhancing rural innovation and governance*. OECD Publishing.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- United Nations Development Programme. (2022). *Governance for sustainable development*. UNDP.
- World Bank. (2020). *Agricultural value chains for development*. World Bank.
- World Bank. (2022). *Transforming agriculture for inclusive growth*. World Bank.